

36A_Pijakan Dan Pengembangan Kajian.pdf

by

Submission date: 14-Oct-2020 02:02PM (UTC+0800)

Submission ID: 1414752360

File name: 36A_Pijakan Dan Pengembangan Kajian.pdf (309.24K)

Word count: 7647

Character count: 51077

PIJAKAN DAN PENGEMBANGAN KAJIAN DI BIDANG ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI: FILOSOFI, TEORI DAN PRAKSIS

Rahma Sugihartati & Laksmi

I. PENDAHULUAN

Pemikiran filosofis, teori dan metode penelitian seperti apakah yang seharusnya menjadi pijakan bagi arah pengembangan studi dan ilmu perpustakaan dan informasi di masa depan? Ke arah mana kajian dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi harus dikembangkan menyikapi perubahan masyarakat post-industrial yang makin familiar dengan internet dan media sosial? Bagaimanakah eksistensi perpustakaan, serta peran pustakawan di era digital? Apa yang semestinya dikembangkan pustakawan menghadapi munculnya berbagai situs internet dan sumber informasi yang seolah tak terbatas dan makin mudah diakses secara mandiri oleh masyarakat terutama para kaum milenial? Pertanyaan-pertanyaan **5** ah yang menjadi perhatian dan bahan diskusi di kalangan pemerhati **ilmu perpustakaan dan informasi** dewasa ini, termasuk di **Indonesia**. Artikel-artikel yang disajikan dalam buku **5** ni merupakan hasil pemikiran dan kajian para akademisi di bidang **ilmu perpustakaan dan informasi di Indonesia**, dan sekaligus merupakan bagian dari upaya untuk menjawab pertanyaan tentang agenda ke depan guna mengembangkan bidang kajian ilmu perpustakaan dan informasi dari segi filosofi, teori dan metodologi serta peran-peran baru bagi perpustakaan dan pustakawan yang relevan dengan kemajuan zaman.

II. RESPON AKADEMISI BIDANG ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI TERHADAP PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Di kalangan ilmuwan dan akademisi di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, apa saja tantangan dan bagaimana kita menyikapi perubahan masyarakat pasca kehadiran teknologi informasi dan internet sebetulnya bukan hal yang baru. Sejak empat-lima dekade lalu, disadari bahwa telah terjadi perubahan yang luar biasa dahsyat di masyarakat akibat kemajuan teknologi informasi dan internet. Daniel Bell sejak tahun 1970-an merupakan salah satu ilmuwan sosial yang mengkaji dampak sosial dari perkembangan media komunikasi digital. Menurut Bell, ada dua indikasi utama dari perkembangan masyarakat post-industrial, yakni penemuan miniatur sirkuit elektronik dan optikal yang mampu mempercepat arus informasi melalui jaringan, serta integrasi dari proses komputer dan telekomunikasi ke dalam teknologi terpadu yang disebut dengan istilah “komunikasi” (Bell, 1973). Ketika di masyarakat diintrodusir teknologi informasi yang konvergen dan akses yang makin meluas terhadap informasi di dunia maya, maka segera saja seluruh pranata dan perilaku penelusuran informasi menjadi berubah total. Model penelusuran informasi yang semata hanya mengandalkan perpustakaan konvensional tidak lagi terjadi, karena di masyarakat muncul berbagai kemudahan dan kecepatan mengakses informasi yang sama sekali berbeda dengan era sebelumnya.

Ahli lain yang mengkaji seluk-beluk dan dampak perkembangan teknologi informasi setelah Daniel Bell adalah Manuel Castells. Menurut Castells (1996) saat ini dunia sedang memasuki “zaman informasi” di mana berbagai kemajuan teknologi informasi digital telah “menyediakan dasar materi” bagi “perluasan pervasif” dari apa yang ia sebut “bentuk jejaring dari organisasi” dalam setiap struktur sosial yang ada di masyarakat. Menurut Castells, integrasi internet ke dalam dunia kehidupan telah menciptakan bentuk baru identitas sosial dan ketidaksetaraan, menjadikan kekuasaan bagian dari arus desentralisasi, sekaligus melahirkan bentuk-bentuk baru berbagai organisasi sosial-ekonomi. Masyarakat mau tidak mau harus beradaptasi dengan perubahan yang dihelakan kemajuan teknologi informasi dan internet.

Castells (1996), menyatakan bahwa di era revolusi informasi, selain ditandai dengan perkembangan teknologi informasi yang luar biasa canggih, juga muncul apa yang ia sebut sebagai kebudayaan virtual riil, yaitu satu sistem sosial-budaya baru di mana realitas itu sendiri sepenuhnya tercakup, sepenuhnya masuk dalam setting citra maya, di dunia fantasi, yang di dalamnya tampilan tidak hanya ada di layar tempat dikomunikasikannya pengalaman, namun mereka menjadi pengalaman itu sendiri. Masyarakat yang semula

berinteraksi dalam ruang yang nyata dan bertatap-muka atau offline, dengan kehadiran internet mereka kini bisa berinteraksi dengan siapapun, tanpa dibatasi nilai dan norma, sehingga di kalangan warga masyarakat yang mengembangkan hubungan dalam jejaring komputer, tak pelak mereka pun tumbuh dengan subkulturnya yang khas – yang berbeda dengan masyarakat konvensional.

Di era masyarakat pasca industri, realitas sosial bahkan bisa dikatakan telah mati, untuk kemudian diambil alih oleh realitas-realitas yang bersifat virtual, realitas cyberspace. Dunia baru yang dimediasi oleh hadirnya teknologi informasi yang makin maju dan super canggih telah melahirkan hal-hal yang serba virtual: kebudayaan virtual dan komunitas virtual (virtual community) yang pola konsumsinya berubah, karena nyaris tidak ada aspek kehidupan sosialnya yang tidak dipengaruhi teknologi informasi dan internet (Sugihartati, 2014). Seperti dikatakan Piliang, Darwin, & Ade (2004), bahwa di era revolusi informasi, masyarakat memang masih berinteraksi satu dengan yang lain, tetapi kini tidak lagi dalam komunitas yang nyata, melainkan di dalam komunitas virtual (Piliang et al., 2004: 64). Internet sebagai satu bentuk jaringan komunikasi dan informasi global telah menawarkan bentuk-bentuk komunitas sendiri (virtual community), bentuk realitasnya sendiri (virtual reality) dan bentuk ruangnya sendiri (cyberspace).

Merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan internet, banyak akademisi di bidang ilmu perpustakaan sejak tahun 2000-an mengemukakan pikiran dan pendapatnya tentang masa depan profesi bidang ilmu perpustakaan dan informasi (Baruchson-Arbib & Bronstein, 2002; Cronin, 1998; Nwosu & Ogbomo, 2010; Yamazaki, 2007), peran-peran baru pustakawan (Aabø, 2005; Fourie, 2004; Materska, 2004), model pelayanan perpustakaan di era informasi (Brophy, 2000), keterampilan pustakawan di era internet (Garrod & Sidgreaves, 1998; Newton & Dixon, 1999), sistem informasi perpustakaan (Goddard, 2003), literasi digital (Robinson & Bawden, 2001). Bahkan 4 tahun terakhir, masa depan perpustakaan serta identitas profesi perpustakaan masih menjadi bahan diskusi (Campbell-Meier & Hussey, 2018; Domer, Campbell-Meier, & Seto, 2017; Kaatrakoski & Lahikainen, 2016; Perini, 2016; Pierson, Gouding, & Campbell-Meier, 2019). Perkembangan dan penggunaan aplikasi media sosial yang semakin massive di masyarakat juga tidak lepas dari perhatian para akademisi untuk dikaji relevansinya dengan bidang ilmu perpustakaan dan informasi (Cooke, 2017; Harrison, Burrell, Velasquez, & Schreiner, 2017; Leung, Sun, & Bai, 2017; Young & Rossmann, 2015). Begitu pentingnya merespon era digital, beberapa akademisi juga memikirkan perubahan pengajaran dan kurikulum dalam pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi (LIS education) (Huggins, 2017; Mole, Dim, & Horsfall, 2017; Weech & Pluzhenskaia, 2010; Wyman &

Imamverdiyev, 2018; Xue, Wu, Zhu, & Chu, 2019; Zhang, Liu, & Mathews, 2015). Bahkan jauh sebelumnya, Sulistyono-Basuki pakar ilmu perpustakaan telah menulis tentang pentingnya kurikulum ilmu perpustakaan berbasis teknologi informasi di Indonesia (Sulistyono-Basuki, 1999).

Perubahan di era digital dan banyaknya fenomena yang menarik dikaji di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, juga membuat beberapa akademisi memberikan perhatian pada masalah metode penelitian. Karena dalam perkembangannya ilmu perpustakaan dan informasi mulai dipandang bersifat interdisipliner (Barthel & Seidl, 2017; Prebor, 2010; Wikgren, 2005), maka mulailah dipikirkan peluang penggunaan pelbagai metode penelitian ilmu sosial (Chu & Ke, 2017; Fidel, 2008; Jamali, 2018; Ullah & Ameen, 2018; VanScoy & Evenstad, 2015). Hingga saat ini sebenarnya telah banyak dihasilkan kajian di bidang ilmu perpustakaan dan informasi dengan menggunakan beragam metode penelitian diantaranya discourse analysis (Closet-Crane, 2011; Oliphant, 2016) dan mixed methods (Ocholla & Shongwe, 2013; Vårheim, Skare, & Lenstra, 2019).

III. TINJAUAN PEMIKIRAN DALAM TIAP-TIAP BAB PADA BUKU INI

Para penulis artikel dalam buku yang tengah tersaji ini dalam batas-batas tertentu telah berhasil memetakan situasi problematik yang timbul dan dihadapi akademisi, perpustakaan serta pustakawan, serta bagaimana seharusnya mereka menyikapi kehadiran era digital serta perkembangan keilmuan yang semakin bersifat interdisipliner. Ketika toko-toko buku harus bersaing dengan virtual shopping mall, buku bacaan harus menghadapi ebook, ejournal di era paperless, dan sumber informasi tidak lagi dimonopoli perpustakaan, lantas apa yang dikembangkan ke depan agar perpustakaan dan pustakawan tidak kehilangan peluangnya di masyarakat? Agus Rusmana (Bab 6) dalam artikelnya berjudul *Library as a center of social interaction in the digital era* dengan nada optimis memperlihatkan meski orang dapat mengakses sumber digital dari internet untuk memperoleh informasi, tetapi mereka intinya masih memerlukan interaksi dengan orang lain untuk berbagi tentang banyak hal, dan perpustakaan menurut Rusmana adalah tempat yang sempurna untuk berinteraksi, dan pustakawan yang professional akan membimbing interaksi mencapai tujuan. Dengan kata lain, di balik kekhawatiran sebagian orang tentang eksistensi perpustakaan yang bakal tergerus perubahan di era digital, Rusmana memperlihatkan hal yang sebaliknya. Bagaimana pengembangan keprofesionalan pustakawan dilakukan dan bagaimana perpustakaan perlu merevitalisasi menghadapi perubahan masyarakat yang tengah terjadi adalah peluang sekaligus

merupakan tantangan yang perlu diantisipasi segera. Di era revolusi informasi seperti sekarang ini, buku ini memperlihatkan paling-tidak ada tiga hal yang harus dihadapi dan perlu diantisipasi para pustakawan, perpustakaan dan masyarakat agar tidak digerus perubahan.

Pertama, di tataran filosofis dan nilai yang mendasari. Sebagai sebuah profesi, institusi layanan publik dan sebagai salah satu bidang keilmuan, keberadaan perpustakaan dan pustakawan tentu tidak mungkin hanya mempertahankan peran-peran konvensional mereka –tanpa mau mengakomodasi perkembangan terbaru masyarakat dan informasi. Blaise Cronin (1983, 1998) jauh-jauh hari telah menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepat mau tidak mau akan memaksa para pustakawan menakar kembali eksistensi dan perannya selama ini. Para pustakawan, menurut Cronin hendaknya merasa bahwa mereka adalah bagian penting dalam kemunculan masyarakat informasi, dan di masa mendatang mereka akan menjadi bagian dari persaingan dengan kelompok-kelompok komersial sektor informasi yang akan bermunculan, terutama yang berkaitan dengan akses dan penyediaan informasi. Berbeda dengan peran pustakawan di masa lalu yang lebih banyak sebagai penata laksana koleksi perpustakaan, di era digital peran pustakawan dituntut lebih terbuka sebagai mitra masyarakat, pengolah berbagai informasi, serta sebagai profesi yang mampu menawarkan kemasan informasi yang memiliki nilai lebih bagi segi kemanfaatannya bagi masyarakat pengguna jasa layanan ¹perpustakaan. Rahma Sugihartati (Bab 1), dalam artikelnya yang berjudul *Deconstruction and reconstruction of the roles of librarians and librarianship from a critical perspective* telah menggarisbawahi perlunya para pustakawan segera mendekonstruksi peran-peran yang mereka kembangkan, untuk kemudian menegaskan peran baru yang lebih sesuai dengan konteks kekinian. Rahma menawarkan pemikiran Derrida sebagai dasar pijakan bagi perpustakaan dan para pustakawan, serta para peneliti ilmu informasi untuk mengevaluasi situasi problematik yang dihadapi, dan kemudian merekonstruksi arah baru yang lebih menjanjikan.

Yohanes Sumaryanto (Bab 2), dalam artikelnya berjudul *Reduksifikasi dunia kehidupan menurut Jürgen Habermas* memaparkan bahwa dalam kehidupan masyarakat modern, ada banyak hal telah berubah dan perlu diantisipasi perpustakaan dan pustakawan. Sekaranglah saatnya pustakawan Indonesia bersikap kritis terhadap tradisi dan otoritas sehingga penerimaan atas sah tidaknya tradisi dunia ditentukan oleh refleksi kita atasnya. Dalam konteks pustakawan Indonesia, hermeneutik kritis Habermas, menurut Sumaryanto akan berfungsi menghadapkan pustakawan dengan teks abnormal yang ditulisnya tanpa kendali kesadarannya agar ia dapat memahamai teksnya sendiri dan mengenali distorsi tak sadarnya, dan dengan cara itu ia

teremansipasi dari ketaksadarannya¹

Artikel yang ditulis Hartono di Bab 3 berjudul Representasi multikultural sebagai strategi dalam pengembangan perpustakaan digital memperlihatkan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan saat ini, salah satu hal yang sering dilupakan, padahal penting adalah bagaimana mengintegrasikan nilai multikultural dalam perpustakaan di era digital. Menurut Hartono, strategi pengembangan perpustakaan digital dapat dipahami dalam tiga pola pendekatan, yaitu: (1) pendekatan manajemen yang didasarkan pada perumusan konsep design, pengembangan koleksi yang beragam dan regulasi akses; (2) modernitas teknologi informasi; dan (3) pengintegrasian nilai multikultural melalui penguatan pada nilai demokrasi informasi melalui keterbukaan akses, modernitas teknologi informasi berbasis humanisme, kesadaran hukum dan keadilan dalam legalitas informasi, resource sharring, mengembangkan toleransi dalam layanan perpustakaan.

Berbeda dengan Hartono yang memfokuskan bahasan pada nilai multikulturalisme sebagai dasar dan budaya dalam pengembangan perpustakaan, Nurdin dalam artikelnya di Bab 4 yang berjudul Contested ideologies in collective development at Muhammadiyah University Library, Yogyakarta-Indonesia merekomendasikan bahwa paradigma konstruktivistik penting digunakan untuk memahami fenomena inheren di perpustakaan yang tidak mengenal kuantifikasi. Dalam perumusan¹ dan pelaksanaan kebijakan untuk mendorong pengembangan perpustakaan tidak akan berkesinambungan jika para pengelola tidak menjadikan ideologi kelembagaan sebagai ukuran pengambilan kebijakan.¹

Sri Rohyanti Zulaikha dalam artikelnya di Bab 5 berjudul Assertive librarian dan tantangan perpustakaan di era revolusi industri 4.0 dalam penyediaan sumber-sumber informasi bagi pemustaka¹ mencoba menjawab tiga pertanyaan besar terkait dengan bagaimana peran assertive librarian, dan bagaimana peran perpustakaan pada era revolusi industri 4.0, serta penyediaan³ akses kepada sumber-sumber informasi di perpustakaan. Menurut Sri Rohyanti tugas pustakawan tidak dapat dipisahkan dari tugas dan fungsi perpustakaan sebagai lembaga penyedia dan pengelola informasi yang bertugas untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi pemustakanya untuk mendapatkan informasi yang tepat secara efisien. Tugas tersebut mengharuskan para pustakawan mempertinggi sikap asertif. Kemampuan berinteraksi merupakan hal utama dalam memberikan layanan informasi sumber-sumber informasi di perpustakaan. Segala aktifitas di perpustakaan berkaitan erat dengan kemampuan berinteraksi, baik antar pustakawan maupun antara pustakawan dan pemustaka, terutama dalam mengakses segala sumber-sumber informasi di perpustakaan sehingga terwujud smart library and smart services.

Kedua, di tataran metode, kajian dan pembelajaran. Sebagai subjek

kajian ilmu perpustakaan dan informasi, perubahan peran baru yang dikembangkan perpustakaan dan pustakawan tentu juga menuntut redesign kurikulum, pengembangan metode kajian dan orientasi berbagai studi yang dikembangkan, baik saat ini maupun di masa depan. Sejumlah penulis dalam buku ini telah menyajikan bahwa tema maupun dasar teoritik dari kajian tentang perpustakaan kini tidak hanya berkuat pada kajian tentang fungsi pelayanan yang dikembangkan perpustakaan bagi para users, tetapi juga telah makin meluas dan menyapa berbagai perspektif teoritik lain dan metode penelitian yang makin beragam. Artikel Nina Mayesti (Bab 7) berjudul **Analisis wacana kritis dalam riset bidang ilmu perpustakaan dan informasi** membahas penerapan konsep dan metode analisis wacana kritis, khususnya dalam analisis visual dalam riset bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Hasil studi yang dilakukan Nina Mayesti terhadap 7 film nasional yang dirilis tahun 2000-an menemukan bahwa pustakawan seringkali direpresentasikan sebagai sang liyan dan terdapat wacana peliyanan terhadap profesi pustakawan dalam film Indonesia yang dikaji. Penggunaan metode **Analisis Wacana Kritis dalam riset bidang ilmu perpustakaan dan informasi** memungkinkan kita untuk mengetahui wacana yang berkembang dan mewakili cara pandang masyarakat mengenai perpustakaan dan informasi. Artikel yang ditulis Tri Soesantari (Bab 8) berjudul **Informasi dan Kesenjangan Gender** memperlihatkan bahwa kajian tentang masalah perpustakaan dan informasi tidak hanya bisa dipahami dari perspektif teori ilmu informasi, tetapi juga bisa menyentosa teori-teori feminisme.

Indira Irawati (Bab 9), dalam artikelnya berjudul **Komodifikasi pemustaka dalam transformasi layanan referensi perpustakaan Universitas Indonesia** menawarkan pendekatan ekonomi politik untuk memahami relasi antara pemustaka dan pustakawan. Lebih dari sekadar bentuk layanan sosial, kehadiran pejabat perpustakaan ternyata kerap kali juga menggunakan perpustakaan sebagai panggung berbagai kegiatan untuk meningkatkan eksistensinya. Orang-orang yang diundang atau yang ‘menawarkan diri’ sebagai nara sumber dijadikan sebagai komoditas oleh kepala perpustakaan sebagai alat untuk eksistensi diri kepada otoritas universitas. Transformasi layanan referensi yang dikaji dengan pendekatan ekonomi politik memperlihatkan bahwa inovasi layanan yang dikonstruksi merupakan representasi dari digitalisasi Perpustakaan Universitas Indonesia. Argumentasi tesis yang dibangun dari penelitian Irawati bahwa pemustaka --dalam hal ini para guru besar-- yang pada mulanya merupakan konsumen layanan referensi berubah menjadi komoditas yang dimanfaatkan oleh pustakawan dan kepala perpustakaan yang membentuk ulang relasi antara pemustaka dengan pustakawan.

Di kalangan peneliti ilmu perpustakaan dan informasi, kajian tentang dampak perkembangan teknologi informasi dan internet, misalnya adalah salah satu tema yang banyak bermunculan dewasa ini. Artikel Ike Iswary

1 Lawanda di Bab 10 berjudul Kerahasiaan pribadi dalam berkomunikasi di media sosial membahas dampak penggunaan media sosial yang makin meluas terhadap risiko penyalahgunaan kerahasiaan pribadi pengguna yang seringkali bermunculan di media sosial. Menurut Ike Iswary ketika perlu dijadikan dasar manusia berkomunikasi, terutama ketika menggunakan media sosial seperti facebook, world wide web, basis yang penting adalah bagaimana di antara pengguna mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai dan tenggang rasa. Artikel yang ditulis Heriyanto (Bab 11) berjudul Ways of understanding information literacy: the identification of three deferent perspectives memetakan bahwa di kalangan peneliti di Australia, paling-tidak ada tiga perspektif yang dikembangkan sebagai arah dan tujuan kajian literasi informasi, yaitu behavioural, relational dan socio-cultural. Sedangkan artikel yang ditulis Luki Wijayanti dan Putu Laxman Pendit di Bab 12 berjudul WhatsApp: virtual as a community hub for UI Lectures memperlihatkan bahwa focus kajian ilmu perpustakaan dan informasi tidak hanya perpustakaan sebagai sebuah lembaga pelayanan, tetapi juga meluas mengkaji peran media sosial (dalam hal ini WhapsApp) sebagai media berkomunikasi di kalangan peneliti Universitas Indonesia. Temuan studi yang mereka lakukan adalah komunikasi melalui media sosial (WhatsApp) di kalangan peneliti Universitas Indonesia ternyata lebih banyak dilakukan pada tingkatan operasional daripada tingkatan strategi penelitian. Artikel Rahmi (Bab 13) berjudul A systematic literature review on information seeking behaviour studies in Indonesia mengkaji perilaku pencarian informasi yang diidentifikasi dari skripsi dan tesis di Universitas Indonesia. Hasil penelitian Rahmi menemukan bahwa model perilaku penelusuran informasi dari (Ellis, 1993) menjadi minat utama mahasiswa.

Dalam menentukan arah perkembangan peran perpustakaan dan bagaimana seharusnya mengelola layanan perpustakaan, sejumlah penulis dalam buku ini mencoba menawarkan gagasan mengkaitkan persoalan tata kelola repositori perpustakaan dengan nilai religiositas, dan pola kepemimpinan yang profetik dan kompetensi. Ini adalah kajian baru yang makin membuka ruang bagi peneliti ilmu perpustakaan dan informasi untuk menyapa dan memasuki 1 nah baru yang makin luas. Mukhlis (Bab 14) dalam artikelnya berjudul Potret nilai religiositas 1 am dalam tata kelola repositori institusi memperlihatkan bagaimana nilai religiositas Islam yang diterjemahkan dalam terminology seperti siddiq (trusted), amanah (responsibilities), fatanah (smartness) dan tabligh (openes) menjadi fondasi kuat yang mempengaruhi tata kelola repositori pada ti 1 perpustakaan universitas di Yogyakarta. Sementara itu, artikel Sungadi di Bab 15 berjudul Membangun kematangan karir pustakawan melalui kepemimpinan profetik dan kompetensi memperlihatkan bahwa karir pustakawan niscaya akan lebih bersinar melalui kepemimpinan yang profetik

dan berbasis pada kompetensi.

Selain tema-tema kajian yang makin luas dan penggunaan perspektif teoritis yang makin beragam, dalam studi-studi di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, salah satu perkembangan yang penting adalah berkaitan pemaknaan suatu objek. Artikel yang ditulis Tamara Adriani Salim (Bab 16) berjudul “Nilai Maknawi Bangunan Sekolah Hogere Burgerschool Koning willem III, Gedung Perpustakaan Nasional RI, Kajian Arkeologi Simbolik Bagi Upaya Penetapan Sebagai Bangunan Cagar Budaya”, merupakan kajian yang menarik sekaligus memperkaya bidang kajian ilmu informasi dan perpustakaan. Dengan mempergunakan teori Ian Hodder dan teori konotasi Roland Barthes berhasil mengungkap makna baru dari bangunan HBS KW III sebagai bangunan bernilai sejarah perintis sekolah menengah di Indonesia yang membawa makna nasionalis yang kuat. Bangunan ini, menurut Tamara bukan hanya membawa makna simbolis penggerak intelektual bangsa Indonesia pada saat itu, namun memiliki makna simbolis pencerdas intelektual bangsa Indonesia.

Ketiga, di tataran praksis, yakni bagaimana kinerja perpustakaan dan pustakawan direvitalisasi dalam pelbagai kehidupan. Sebagai institusi yang memiliki peran sebagai layanan dan sumber informasi bagi masyarakat, perpustakaan mau tidak mau harus segera melakukan proses transformasi serta melakukan berbagai pembenahan, terutama menghadapi proses digitalisasi produk-produk bacaan dan munculnya para pesaing lain yang memiliki peran yang sama dalam proses penyediaan jasa informasi. Di era digital, perkembangan teknologi informasi dengan segala kecanggihannya merupakan ancaman yang benar-benar signifikan dan berdampak terhadap eksistensi perpustakaan --terlebih lagi jika dilihat dari pemanfaatannya yang memunculkan bentuk-bentuk baru bisnis yang berbasis informasi dan teknologi informasi (Brophy, 2007: 3-20). Brophy (2007) mencatat ada beberapa hal yang terjadi, yang perlu diantisipasi perpustakaan agar tidak kehilangan pengunjung, antara lain: (1) perkembangan bisnis penerbitan dengan metode alternatif baru yang berbasis electronic archives dan e-print service; (2) ekspansi toko-toko buku dalam bentuk internet bookshop; (3) E-commerce; (4) social networking; (5) interactive television services; (6) online learning environments; (7) mobile communications; dan (8) commercial information retrieval.

Lebih dari sekadar penyedia informasi dan buku bacaan, perpustakaan dan pustakawan di era digital juga memiliki tanggungjawab untuk memaksimalkan manfaat informasi bagi masyarakat, terutama dalam mendukung peningkatan kemampuan literasi informasi (information literacy) masyarakat. Literasi informasi per definisi adalah kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi secara efektif informasi yang dibutuhkan dan merupakan modal kemampuan untuk mengembangkan sikap belajar seumur hidup. Masyarakat yang memiliki

kemampuan literasi informasi pada dasarnya adalah generasi yang dibutuhkan dalam era perubahan masyarakat menuju masyarakat jaringan (network society). Adalah tugas para pustakawan, baik itu pustakawan perguruan tinggi atau universitas, perpustakaan umum dan khusus, untuk membangun generasi information-literate yang merupakan generasi yang dibutuhkan dalam era perubahan masyarakat menuju masyarakat jaringan (network society). Artikel yang ditulis Ade Abdul Hak di Bab 17 berjudul *An analysis of integrated e-literacy model in prophetic-humanization communication behavior*, misalnya memperlihatkan bagaimana tingkat kematangan e-literacy berpengaruh signifikan terhadap perilaku komunikasi profetik humanisasi melalui perilaku informasi yang dikembangkan para dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang menjadi subjek kajiannya. Sementara itu artikel yang ditulis Wina Erwina (Bab 18) berjudul *Pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi kesehatan jamak (plural)* membahas bagaimana sistem informasi kesehatan dan komunikasi terpadu dapat berkontribusi bagi peningkatan literasi kesehatan masyarakat lokal, khususnya masyarakat di Kelurahan Sukamiskin, Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Tri Margono (Bab 19) dalam artikelnya berjudul *Kebijakan informasi pertanian dan penyebarannya di Indonesia: komoditas pangan fungsional dan layanan penyuluh pertanian* bertujuan untuk mengetahui jenis dan topik utama tentang komoditas pertanian yang paling banyak diteliti melalui artikel ilmiah di Asia dan untuk memahami tren informasinya di negara-negara utama Asia selamaturun waktu 10 tahun terakhir. Tujuan lain adalah untuk mengidentifikasi masalah kesenjangan informasi antara pemerintah dan penyuluh serta untuk mengidentifikasi sumber daya informasi yang penting bagi penyuluh berdasarkan kebutuhan informasi mereka untuk mengembangkan kerangka kerja metadata guna membantu penyuluh dalam mengakses ke sumber daya informasi primer. Penelitian Margono menunjukkan meskipun penyediaan portal database khusus (online) oleh Pusat Informasi sangat penting bagi penyuluh dalam mengatasi masalah konten. Namun demikian, interoperabilitas lintas-institusional dari database dan repositori adalah masalah penting yang perlu dipersiapkan dalam menyediakan portal informasi pertanian.

Seluruh artikel yang dipaparkan dalam buku ini meski membahas berbagai isu dan tema yang berbeda-beda, tetapi semua intinya sama, yakni menyiratkan semangat optimisme tentang eksistensi perpustakaan dan peran pustakawan di era digital yang makin sangat terbuka untuk dikembangkan serta berpijak pada filosofi dan teori. Apakah perpustakaan dan pustakawan tengah menggali lubang kuburnya sendiri atau justru bersiap diri menyambut masa depan yang lebih gemilang, semua merupakan tantangan yang harus dihadapi dan direspon dengan bijak oleh para ilmuwan, akademisi serta

praktisi di bidang ilmu perpustakaan dan informasi.

IV. KOLABORASI ANTAR AKADEMISI: AGENDA KE DEPAN UNTUK MENGEMBANGKAN ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI DI INDONESIA

Melihat perkembangan isu kajian di bidang ilmu perpustakaan dan informasi yang meluas dengan landasan filosofi dan teori yang makin beragam, maka agenda penting ke depan yang perlu dikembangkan di antaranya adalah kolaborasi antar akademisi di Indonesia. Kolaborasi antar akademisi, baik di dalam satu bidang ilmu maupun antar bidang ilmu, sangat penting dilakukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Proses pengembangan ilmu menunjukkan sebuah proses pembelajaran, yang membutuhkan interaksi antar-akademisi. Seorang individu melakukan pembelajaran dalam mengembangkan kognitif, pembelajaran berkolaborasi antar akademisi, maupun pembelajaran yang berhubungan dengan organisasi dan pasar. Proses pembelajaran tersebut bertujuan untuk menciptakan modal intelektual yang terdiri dari 3 (tiga) komponen yang saling berkaitan, yaitu modal manusia, modal struktural, dan modal relasional (Pienaar & ASA du Toit, 2009). Setiap akademisi memiliki modal manusia, yaitu pengetahuan kognitif dan keterampilan tertentu. Ia juga memiliki modal struktural, yaitu kekuatan dalam struktur yang menuntunnya dalam berstrategi dalam suatu organisasi, tim kerja, atau jejaring, sedangkan modal relasional lebih cenderung kepada hubungan eksternal, seperti hubungan akademisi dengan akademisi di luar bidang ilmunya atau dengan suatu lembaga/industry (Badar & Seniati, 2017; Laksmi & Fauziah, 2016).

Berdasarkan pemahaman tersebut, kolaborasi akan mudah dilakukan jika individu memiliki modal manusia yang didukung penuh oleh modal structural dan modal relasional. Artinya, suatu kolaborasi tidak hanya tergantung pada komitmen seorang individu atas tindakannya, tetapi bergantung juga kepada hubungan dengan rekan, organisasi, dan di luar organisasi. Dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan, seorang akademisi menciptakan, menggunakan, menyebarkan, sekaligus mengkonstruksi pengetahuan, yang terjadi baik di dalam disiplin ilmunya sendiri maupun di dalam disiplin ilmu yang berbeda (Badar & Seniati, 2017; Soerjoatmodjo, 2016). Kolaborasi antar disiplin ilmu dibedakan dalam 4 bentuk yang masing-masing menunjukkan tingkat kerjasama antar akademisi (Barthel & Seidl, 2017). Bentuk tersebut adalah:

- 1) Lintas-disiplin (cross-disciplinary) menggambarkan bentuk kolaborasi yang paling cair dan tidak spesifik antara disiplin ilmu. Biasanya

bentuk ini melibatkan atau menghubungkan dua atau lebih disiplin ilmu.

- 2) Multidisiplin (multidisciplinary) menunjukkan hubungan antar disiplin ilmu yang lebih intens dibandingkan lintas-disiplin. Umumnya penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang jelas untuk menyelesaikan masalah, yang melibatkan berbagai disiplin ilmu yang dapat bekerja secara paralel.
- 3) Interdisipliner (interdisciplinary) merupakan bentuk kerjasama yang membutuhkan kolaborasi secara rinci. Penelitian ini meleburkan beberapa disiplin ilmu, mulai dari penentuan masalah hingga penerapan metodologi.
- 4) Transdisipliner (transdisciplinary) merupakan bentuk kolaborasi yang menunjukkan kerja sama antara ilmuwan dan praktisi, pengambil keputusan atau masyarakat luas. Laporan penelitian yang dihasilkan digunakan untuk pemecahan masalah.

15

Kolaborasi antar akademisi dalam mengembangkan ilmu perpustakaan dan informasi di Indonesia merupakan suatu fenomena yang unik. Sebagai ilmu yang sedang berkembang, akademisi di tingkat doktoral hingga saat ini telah mencapai sekitar 60-an orang dan 1 orang guru besar, hampir semuanya berasal dari berbagai bidang ilmu yang berbeda, seperti disiplin ilmu pendidikan, ilmu filsafat, ilmu sejarah, antropologi, arkeologi, dan masih banyak lagi. Sejumlah kecil doktor mendapatkan gelarnya dari disiplin ilmu perpustakaan dan informasi dari luar negeri. Keberagaman tersebut dikarenakan oleh tuntutan lembaga yang menaungi para akademisi tersebut bekerja. Program studi ilmu perpustakaan dan informasi berada di berbagai fakultas yang berbeda-beda, yaitu di fakultas budaya dan humaniora, fakultas komunikasi, fakultas ilmu sosial dan politik, fakultas ilmu komputer, atau fakultas ilmu administrasi. Sementara di Indonesia belum ada program studi tingkat doktoral di bidang tersebut, para akademisi terpaksa mengambil program studi yang berbeda.

Kolaborasi dalam bidang ilmu ini tidak hanya dengan akademisi di rumpun bidang ilmu social, tetapi juga memungkinkan berkolaborasi dengan akademisi di rumpun bidang ilmu eksakta. Pada penelitian mengenai manuskrip langka, akademisi tidak hanya meneliti pengelolaan dan preservasi koleksi, mereka juga meneliti kelembaban atau jamur pada koleksi, serta tingkat suhu dan kelembaban ruang penyimpanan, akademisi berkolaborasi dengan akademisi bidang ilmu kimia dan biologi. Sementara itu, dampak debu dan jamur bagi pustakawan, seperti penyakit asma dan exim, akademisi bisa berkolaborasi dengan akademisi bidang ilmu kesehatan.

Pada awalnya fenomena tersebut menimbulkan pro dan kontra. Namun di satu sisi, latar belakang pengetahuan para akademisi yang sangat variatif

ini merupakan modal kuat yang mendukung berjalannya interdisipliner dan multidisipliner yang dapat mengembangkan keilmuan. Dapat dikatakan bahwa ilmu perpustakaan dan informasi mengalami pergeseran paradigma, dari monodisiplin ke multidisiplin, dan dari positivistic ke post positivistic (Hillenbrand, 2013). Doktor di bidang ilmu perpustakaan dan informasi yang mempelajari ilmu agama, yang memiliki sikap terbuka akan dengan mudah menerima dan memahami pengetahuan yang diberikan oleh doktor dengan disiplin ilmu sama tetapi mendalami ilmu computer. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut bisa jadi malah membuat masing-masing individu akan saling bertentangan, yang kemungkinan disebabkan oleh ketidakpahaman satu sama lain, atau munculnya perasaan superior atau inferior. Masing-masing mengangg¹⁴ disiplin ilmunya adalah yang paling sesuai untuk menjadi dasar pemikiran bidang ilmu perpustakaan dan informasi, atau sebaliknya, akademisi lain merasa ilmu yang dipelajarinya tidak sesuai dengan ilmu perpustakaan dan informasi.

Kompleksitas dalam perkembangan ilmu pengetahuan dapat mempengaruhi tingkat kolaborasi antar akademisi. Akademisi baik di bidang eksakta maupun ilmu sosial di Indonesia, tingkat kolaborasi antar akademisi dinilai rendah. Akademisi d¹¹ tingkat kolaborasi internasional berasal hanya dari 3 universitas top di Indonesia, yaitu Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada. Mereka berkolaborasi dengan peneliti di Negara maju seperti Jepang, Amerika, Belanda, Australia, dan Jerman, sedangkan kolaborasi dengan peneliti di Asia Tenggara adalah dengan Malaysia, Thailand, dan Singapore (Darmadji, Prasajo, Kusumaningrum, & Andriansyah, 2018).

Hal tersebut juga terungkap dalam beberapa penelitian bahwa sebagian besar akademisi memilih untuk melakukan penelitian mandiri (Nadhiroh, 2015; Soerjoatmodjo, 2016; Wahid N, 2012). Rendahnya tir¹³ at kolaborasi antar akademisi terjadi di semua bidang ilmu. Penelitian yang dilakukan lebih⁶ dari 30 tahun yang lalu yang dilakukan oleh Sumaryanto tahun 1987, yang mengkaji pola kepengarangan artikel yang dimuat pada Indeks Majalah Ilmiah Indonesia 1982-1985. Dari sembilan bidang ilmu, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat kolaborasi pengarang pada majalah ilmiah untuk semua bidang ilmu sangat rendah (38,20%) (Wahid N, 2012). Hal tersebut masih berlaku di masa sekarang. Di bidang eksakta, banyak temuan penelitian yang menyatakan bahwa kolaborasi antar peneliti Indonesia sangat rendah. Penelitian di bidang K⁴ nia yang dilakukan oleh Irene Muflikh Nadhiroh tahun 2015, yang berjudul Jaringan Co-Authorship dan Poter⁴ Kolaborasi Riset Indonesia dengan Analisis Jaringan Sosial menyatakan bahwa jaringan co-authorship antar penulis Indonesia di Jurnal Internasional masih saling terpisah; hubungan yang terbentuk masih sangat sedikit; dan hubungan akademia-industri

belum cukup terlihat (Nadhiroh, 2015). Kolaborasi antar penulis mayoritas dengan penulis yang berasal dari institusi yang sama, sedangkan kerjasama dengan penulis yang berasal dari institusi yang berbeda masih sedikit. Padahal kesamaan area penelitian cukup signifikan, yang memungkinkan munculnya jaringan co-authorship yang lebih tinggi. Potensi jaringan co-authorship yang terbentuk juga dapat ditentukan oleh peran penulis.

Meskipun dibutuhkan penelitian lebih lanjut, secara umum tulisan para doktor di dalam buku ini menunjukkan bahwa kolaborasi di antara akademisi dapat dihitung dengan jari. Dari 19 makalah, terdapat 1 makalah yang mengutip 11 tulisan doktor lainnya, dan sebanyak 5 makalah yang mengutip 1 hingga 2 tulisan doktor lain. Frekuensi pengutipan tersebut bisa lebih tinggi, mengingat beberapa tema tulisan sebenarnya saling terkait. Namun demikian, perlu dilakukan penelitian lebih jauh untuk menunjukkan masalah kolaborasi ini secara rinci. Pernyataan ini sekedar menunjukkan permasalahan secara ringan, bukan bermaksud menilai tulisan para doktor.

Apa yang menghambat para akademisi untuk berkolaborasi? Sulistyowati Irianto, salah satu pakar menyatakan bahwa permasalahan tersebut berakar dari otonomi atau kebebasan akademis (Irianto, 2012). Seorang akademisi memiliki kebebasan akademik untuk mengejar gagasan dan minat di bidangnya sendiri, bebas juga untuk memilih topic dan metode, dan bebas untuk menentukan pasangan kerjasamanya. Kebebasan untuk berpikir dan mengekspresikan pendapat merupakan kebebasan intelektual yang perlu dihargai oleh para akademisi, tanpa memandang status sosial, latar belakang sosial, dan semua hal di luar atmosfer akademik. Otonomi atau kolaborasi bukan hanya masalah menulis sendiri atau menulis bersama, tetapi juga menyangkut masalah saling percaya antar akademisi (Soerjoatmodjo, 2016). Masalah otonomi juga mencakup ego dan emosi, serta pemahaman terhadap lingkungan dan perilaku.

Dalam kasus akademisi di bidang ilmu perpustakaan dan informasi yang terdiri dari berbagai bidang ilmu, otonomi menjadi hambatan yang paling dominan. Dengan mengusung keilmuan yang berbeda-beda dalam melihat fenomena di bidang perpustakaan dan informasi, para akademisi dimungkinkan untuk mengklaim bahwa ilmunya yang paling penting dan lebih unggul dari ilmu lainnya, yang dapat mengatasi fenomena terkait. Sehingga di antara para akademisi sulit menemukan kesepakatan ilmiah untuk memahami suatu fenomena. Proses pembelajaran membutuhkan perilaku ilmiah, yang mencakup perilaku egaliter, sikap bijak untuk saling melengkapi, nilai kejujuran dan keterbukaan, serta mau menerima hal-hal baru.

Selain masalah otonomi, hambatan untuk berkolaborasi juga disebabkan oleh lemahnya modal struktural. Berdasarkan peraturan pemerintah, seorang akademisi diwajibkan untuk memperebutkan hibah, menghasilkan artikel untuk kenaikan pangkat, dan memiliki topik penelitian yang spesifik untuk menjadi

guru besar (Toha-Sarumpaet, Budiman, & Armando, 2012). Masalah struktural terkait juga dengan terbatasnya waktu penyelesaian penelitian, apalagi jika dikaitkan dengan durasi waktu yang dibutuhkan oleh metode kualitatif dalam penelitian sosial dan humaniora. Peraturan tersebut menyulitkan akademisi untuk bekerjasama dengan akademisi lainnya, termasuk bekerjasama dengan sekelompok masyarakat, lembaga, atau industri dalam kaitannya dengan berbagai administrasi yang harus dipenuhi, termasuk juga benefit penelitian yang nantinya diperoleh secara individual.

Banyak pendapat yang membahas strategi pengembangan ilmu pengetahuan. Secara umum, prinsip dasar yang mendasari strategi tersebut adalah pemahaman akan pentingnya berkolaborasi. Seperti telah dijelaskan, kolaborasi bukan sekedar berbagi pengetahuan dan berbagi data penelitian, tetapi juga berbagi otonomi. Pemahaman tersebut akan menuntun akademisi untuk secara kreatif dan produktif menghasilkan karya yang bermanfaat. Intinya, akademisi atau ilmuwan merupakan penentu utama dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan (Maftukhin, 2015). Selain itu, pemahaman juga mengacu pada pernyataan bahwa seorang ilmuwan harus selalu memihak kemanusiaan untuk menciptakan peradaban (Toha-Sarumpaet et al., 2012). Tujuan akademisi melakukan penelitian bukan hanya mencari kebenaran, melainkan juga untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

Ke-9 strategi berikut ini menurut Qomar (di dalam Maftukhin, 2015) ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sekaligus dapat dimanfaatkan dalam strategi berkolaborasi antar akademisi dalam melakukan penelitian. Ke-9 strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mengubah cara berpikir normatif menjadi berpikir teoritis-aplikatif. Berpikir normatif yaitu berpikir secara generik, umum, dan multi-persepsi. Misalnya seseorang meneliti mengenai pustakawan sebagai agen pengubah dalam penerapan gerakan literasi di suatu masyarakat. Ia akan menguraikan pustakawan yang melakukan gerakan literasi sebagai agen pengubah, tanpa memahami konsep dan karakteristik agen pengubah dan cara mengubah, serta konsep literasi dan makna masyarakat. Jika ia menggunakan cara berpikir seperti itu, ia tidak dapat mengembangkan pertanyaan dan memikirkan kemungkinan lain mengenai fenomena yang dihadapinya. Hasil penelitiannya akan mengarah pada langkah praktis cara menerapkan literasi. Dengan berpikir secara teoritis-aplikatif, seseorang mampu mengorganisir pemahamannya berdasarkan kaidah dalam teori dan merefleksikannya pada realitas. Salah satu strategi untuk mengubah hal tersebut adalah dengan cara banyak membaca berbagai teori dari disiplin ilmu yang

berbeda, serta berdialog dengan pakarnya.

- 2) Mengubah cara berpikir ideologis menjadi berpikir rasional. Berpikir ideologis merupakan cara berpikir yang berpegang pada suatu prinsip tertentu, sehingga cenderung menutup diri untuk menerima sesuatu yang baru. Misalnya, seorang pustakawan berpikir bahwa perpustakaan yang baik adalah perpustakaan di mana pengguna tidak boleh mengeluarkan suara. Di lain pihak, pengguna anak muda memiliki cara belajar yang berbeda dengan anak muda di masa lalu. Mereka membutuhkan ruang diskusi. Jika berpikir rasional, pustakawan harus lebih fleksibel mengingat fenomena yang dihadapi berbeda dari kondisi idealis yang disebut di dalam teori ilmu perpustakaan. Strategi yang dapat ditawarkan adalah dengan melakukan latihan mengamati dan menganalisis suatu realitas.
- 3) Menghindari penyakralan. Sejalan dengan berpikir idealis, seorang akademis yang menyakralkan suatu pemikiran akan berpegang tegus pada pemikiran tersebut, menganggapnya yang paling benar, dan tidak bersedia menerima pemikiran lain. Hal tersebut akan menghambat kreativitas dan inovasi, dan sulit mengungkapkan kebenaran.
- 4) Mengubah kecenderungan cara berpikir aksiologis menjadi berpikir secara epistemologis. Cara berpikir aksiologis menunjukkan seseorang yang cenderung mempersoalkan persoalan-persoalan dasar yang berkisar pada hasil, sehingga hanya menghabiskan energi tetapi tidak memberikan kontribusi untuk kemajuan. Sebaliknya berpikir secara epistemologis merupakan cara yang lebih produktif karena menekankan pada proses, sehingga dapat digunakan untuk mengkonstruksi ilmu pengetahuan.
- 5) Mengubah cara berpikir yang menekankan pada penguasaan materi menjadi penekanan pada metodologi. Pertama-tama seseorang perlu memahami teori dan konsep dalam suatu ilmu pengetahuan, kemudian ia harus mampu menguasai metodologi. Penguasaan metode tersebut penting dimiliki untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Misalnya, dalam menguasai teori dan konsep manajemen perpustakaan, tidak cukup hanya memahami perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, tetapi juga harus menguasai metode penerapan manajemen, misalnya dengan metodologi ilmu budaya, ilmu sejarah, dan lainnya.
- 6) Mengubah mentalitas inferior menjadi superior dalam pengembangan pemikiran-pemikiran strategis. Sebagai ilmu yang baru berkembang, akademisi di bidang ilmu perpustakaan dan informasi paling tidak dapat merasakan menjadi pihak yang kecil dan tidak berarti di tengah-

tengah ilmu mainstream, seperti geologi, astronomi, biologi, kimia, arkeologi, dan seterusnya. Akademisi di bidang ini perlu berupaya agar dapat menciptakan ilmu pengetahuan yang dapat diterima oleh disiplin ilmu lainnya dengan memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

- 7) Mengubah kebiasaan mengekspresikan pikiran secara lisan menjadi tradisi tulis. Akademisi di bidang ilmu perpustakaan dan informasi mempelajari budaya informasi yang mencakup budaya lisan dan budaya baca, perilaku informasi, manajemen pengetahuan, masyarakat informasi (information society). Akademisi perlu melakukan lebih banyak penelitian dan mempublikasikan laporan penelitiannya.
- 8) Mengubah kebiasaan menyampaikan pemikiran orang lain menjadi kebiasaan menyampaikan pemikiran sendiri. Akademisi mempelajari pemikiran, teori, dan konsep dari Barat, menerapkannya di dalam masyarakat dan merefleksikannya, sehingga ia dapat menciptakan pemikiran baru untuk disampaikan ke publik. Hal tersebut terjadi dalam penerapan kode etik pustakawan yang diperkenalkan oleh Asosiasi Pustakawan Indonesia. Meskipun konsepnya terlihat sesuai, namun akademisi perlu menemukan kode etik pustakawan yang sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia, serta kearifan lokalnya. Berdasarkan nilai dan norma yang berlaku, konsep tentang kode etik pustakawan akan berkembang menjadi gagasan yang berbeda.
- 9) Mengembangkan pemikiran dari skala lokal-nasional menjadi skala internasional. Para akademisi selama ini baru pada tahap mengembangkan pengetahuan dalam skala lokal-nasional, meskipun ada beberapa yang telah berkolaborasi secara internasional. Kebanyakan mereka adalah akademisi yang sedang menempuh studi di luar negeri atau memang sedang melakukan kerjasama, sehingga memungkinkan mereka berkolaborasi di tingkat internasional.

Kolaborasi antar akademisi baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional perlu terus dilakukan secara berkelanjutan dengan menerapkan ke-9 strategi, dan juga strategi lain yang tentunya kontekstual, rasional, dan realistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aabø, S. (2005). The role and value of public libraries in the age of digital technologies. *Journal of Librarianship and Information Science*, 37(4), 205–211. <https://doi.org/10.1177/0961000605057855>
- Badar, E. F., & Seniati, A. N. L. (2017). Pengaruh trust terhadap berbagi

- pengetahuan melalui mediasi komitmen organisasi pada dosen perguruan tinggi. *Jurnal Indigenous*, 2(1), 7–27.
- Barthel, R., & Seidl, R. (2017). Interdisciplinary collaboration between natural and social sciences – status and trends exemplified in Groundwater Research. *PLoS ONE*, 12(1), 1–27. <https://doi.org/DOI:10.1371/journal.pone.0170754>
- Baruchson-Arbib, S., & Bronstein, J. (2002). A view to the future of the library and information science profession: A Delphi study. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 53(5), 397–408. <https://doi.org/10.1002/asi.10051>
- Bell, D. (1973). *The coming of post-industrial society. A ventury in social forecasting*. New York: Basic Books.
- Brophy, P. (2000). Towards a generic model of information and library services in the information age. *Journal of Documentation*, 56(2), 161–184. <https://doi.org/10.1108/EUM0000000007113>
- Brophy, P. (2007). *The library in the twenty-first century*. London: Facet Publishing.
- Campbell-Meier, J., & Hussey, L. (2018). Exploring becoming, doing, and relating within the information professions. *Journal of Librarianship and Information Science*. <https://doi.org/10.1177/0961000618757298>
- Castells, M. (1996). *The rise of the network society* (2nd ed.). Oxford, UK: Blackwell Publishing.
- Chu, H., & Ke, Q. (2017). Research methods: What’s in the name? *Library and Information Science Research*, 39(4), 284–294. <https://doi.org/10.1016/j.lisr.2017.11.001>
- Closet-Crane, C. (2011). A critical analysis of the discourse on academic libraries as learning places. *Advances in Library Administration and Organization* (Vol. 30). Emerald Group Publishing Ltd. [https://doi.org/10.1108/S0732-0671\(2011\)0000030004](https://doi.org/10.1108/S0732-0671(2011)0000030004)
- Cooke, N.A. (2017). Posttruth, truthiness, and alternative facts: Information behavior and critical information consumption for a new age. *The Library Quarterly*, 87(3), 211–221. <https://doi.org/10.1086/692298>
- Cronin, B. (1983). Post-industrial society: Some manpower issues for the library/information profession. *Journal of Information Science*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.1177/016555158300700101>
- Cronin, B. (1998). Information professionals in the digital age. *International Information and Library Review*, 30(1), 37–50. <https://doi.org/10.1080/10572317.1998.10762464>
- Darmadji, A., Prasajo, L. D., Kusumaningrum, F. A., & Andriansyah, Y. (2018). Research productivity and international collaboration of top Indonesian universities. *Current Science*, 115(4), 653–658. <https://doi.org/10.1002/cssc.12200>

- doi.org/10.18520/cs/v115/i4/653-658
- Domer, D., Campbell-Meier, J., & Seto, I. (2017). Making sense of the future of libraries. *IFLA Journal*, 43(4), 321–334. <https://doi.org/10.1177/0340035217727554>
- Ellis, D. (1993). Modeling the information-seeking patterns of academic researchers: A grounded theory approach, *The Library Quarterly*, 63(4), 469–486.
- Fidel, R. (2008). Are we there yet?: Mixed methods research in library and information science. *Library and Information Science Research*, 30(4), 265–272. <https://doi.org/10.1016/j.lisr.2008.04.001>
- Fourie, I. (2004). Librarians and the claiming of new roles: How can we try to make a difference? *Aslib Proceedings*, 56(1), 62–74. <https://doi.org/10.1108/00012530410516877>
- Garrod, P., & Sidgreaves, I. (1998). Skills for new information professionals: the SKIP project. *Program*, 32(3), 241–263.
- Goddard, L. (2003). The integrated librarian: IT in the systems office. *Library Hi Tech*, 21(3), 280–288.
- Harrison, A., Burrell, R., Velasquez, S., & Schreiner, L. (2017). Social media use in academic libraries: A phenomenological study. *Journal of Academic Librarianship*, 43(3), 248–256. <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2017.02.014>
- Hillenbrand, C. (2013). Librarianship in the 21st century—crisis or transformation? *The Australian Library Journal*, 54(2), 164–181. <https://doi.org/10.1080/00049670.2005.10721744>
- Huggins, S. (2017). Practice-based learning in LIS education: An overview of current trends. *Library Trends*, 66(1), 13–22. <https://doi.org/10.1353/lib.2017.0025>
- Irianto, S. (2012). Kebebasan akademik itu... Kompas.Com. Retrieved from <https://edukasi.kompas.com/read/2012/05/05/1237102/Kebebasan.Akademik.Itu..%5C>
- Jamali, H. R. (2018). Does research using qualitative methods (grounded theory, ethnography, and phenomenology) have more impact? *Library and Information Science Research*, 40(3–4), 201–207. <https://doi.org/10.1016/j.lisr.2018.09.002>
- Kaatrakoski, H., & Lahikainen, J. (2016). “What we do every day is impossible”: Managing change by developing a knotworking culture in an academic library. *Journal of Academic Librarianship*, 42(5), 515–521. <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2016.06.001>
- Laksmi, & Fauziah, K. (2016). *Budaya informasi*. Jakarta: Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan Indonesia.

- Leung, X. Y., Sun, J., & Bai, B. (2017). Bibliometrics of social media research: A co-citation and co-word analysis. *International Journal of Hospitality Management*, 66, 35–45. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2017.06.012>
- Maftukhin. (2015). Ilmuwan, etika dan strategi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. *Epistemé*, 10(1), 199–226.
- Materska, K. (2004). Librarians in the knowledge age. *New Library World*, 105(1198), 142–148. <https://doi.org/10.1108/03074800410526776>
- Mole, A. J. C., Dim, C. L., & Horsfall, M. N. (2017). Re-engineering LIS education to meet industrial needs for knowledge societies. *Journal of Librarianship and Information Science*, 49(3), 313–319. <https://doi.org/10.1177/096400616637907>
- Nadhiroh, I. M. (2015). Jaringan co-authorship dan potensi kolaborasi penelitian indonesia dengan analisis jaringan sosial. INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- Newton, R., & Dixon, D. (1999). New roles for information professionals: User education as a core professional competency within the new information environment. *Journal of Education for Library and Information Science*, 40(3), 151. <https://doi.org/10.2307/40324107>
- Nwosu, O., & Ogbomo, E. F. (2010). The impact of the information society on the library and information science profession. *Library Philosophy and Practice*, 2010(OCTOBER), 1–3.
- Ocholla, D., & Shongwe, M. (2013). An analysis of the library and information science (LIS) job market in South Africa. *South African Journal of Libraries and Information Science*, 79(1), 35–43. <https://doi.org/10.7553/79-1-113>
- Oliphant, T. (2016). Social justice research in library and information sciences: A case for discourse analysis. *Library Trends*, 64(2), 226–245. <https://doi.org/10.1353/lib.2015.0046>
- Perini, M. (2016). *The academic librarian as blended professional. Reassessing and redefining the role.* Cambridge, USA: Chandos Publishing.
- Pienaar, J. J., & ASA du Toit. (2009). Role of the learning organisation paradigm in improving intellectual capital. *Journal of Contemporary Management*, 6, 121–137. Retrieved from <http://www.researchgate.net/publication>
- Pierson, C. M., Gouding, A., & Campbell-Meier, J. (2019). An integrated understanding of librarian professional identity. *Global Knowledge, Memory and Communication*, 68(4/5), 413–430. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.1108/GKM-01-2019-0008>
- Piliang, Y. A., Darwin, S., & Ade, E. G. (2004). *Dunia yang berlari: Mencari “Tuhan-tuhan digital.”* Jakarta: Grasindo.

- Prebor, G. (2010). Analysis of the interdisciplinary nature of library and information science. *Journal of Librarianship and Information Science*, 42(4), 256–267. <https://doi.org/10.1177/0961000610380820>
- Robinson, L., & Bawden, D. (2001). Libraries and open society; Popper, Soros and digital information. *Aslib Proceedings*, 53(5), 167–178. <https://doi.org/10.1108/EUM0000000007051>
- Soerjoatmodjo, G. W. L. (2016). Berbagi pengetahuan atau tidak?: Dilema akademisi peneliti di perguruan tinggi. *Fakultas Psikologi, Universitas Pembangunan Jaya*, 2(24).
- Sugihartati, R. (2014). *Perkembangan masyarakat informasi & teori sosial kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Sulistyo-Basuki. (1999). Information technology and library education in Indonesia: recent developments in the curriculum. *Education for Information*, 17, 353–361.
- Toha-Sarumpaet, R. K., Budiman, M., & Armando, A. (Eds.). (2012). *Membangun di atas puing integritas: belajar dari Universitas Indonesia*. Jakarta: Gerakan UI Bersih dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ullah, A., & Ameen, K. (2018). Account of methodologies and methods applied in LIS research: A systematic review. *Library and Information Science Research*, 40(1), 53–60. <https://doi.org/10.1016/j.lisr.2018.03.002>
- VanScoy, A., & Evenstad, S. B. (2015). Interpretative phenomenological analysis for lis research. *Journal of Documentation*, 71(2), 338–357. <https://doi.org/10.1108/JD-09-2013-0118>
- Vårheim, A., Skare, R., & Lenstra, N. (2019). Examining libraries as public sphere institutions: Mapping questions, methods, theories, findings, and research gaps. *Library and Information Science Research*, 41(2), 93–101. <http://doi.org/10.1016/j.lisr.2019.04.001>
- Wahid N. (2012). *Kolaborasi, graf komunikasi, dan produktivitas peneliti dalam penulisan karya ilmiah*. Retrieved July 23, 2019, from <http://digilib.undip.ac.id/v2/2012/05/11/kolaborasigraf-komunikasidan-produktivitas-peneliti-dalam-penulisan-karya-ilmiah/>
- Weech, T. L., & Pluzhenskaia, M. (2010). LIS education and multidisciplinary: An exploratory study. *Journal of Education for Library and Information Science*, 46(2), 154. <https://doi.org/10.2307/40323867>
- Wikgren, M. (2005). Critical realism as a philosophy and social theory in information science? *Journal of Documentation*, 61(1 SPEC. ISS.),

- 11–22. <https://doi.org/10.1108/00220410510577989>
- Wyman, A., & Imamverdiyev, M. (2018). Global trends and transformations in library science education. *Information and Learning Science*, 119(3–4), 215–225. <https://doi.org/10.1108/ILS-11-2017-0110>
- Xue, C., Wu, X., Zhu, L., & Chu, H. (2019). Challenges in LIS education in China and the United States. *Journal of Education for Library and Information Science*, 60(1), 35–61. <https://doi.org/10.3138/jelis.60.1.2018-0006>
- Yamazaki, H. (2007). Changing society, role of information professionals and strategy for libraries. *IFLA Journal*, 33(1), 50–58. <https://doi.org/10.1177/0340035207076409>
- Young, S. W. H., & Rossmann, D. (2015). Building library community through social media. *Information Technology and Libraries*, 34(1), 20–37. <https://doi.org/10.6017/ital.v34i1.5625>
- Zhang, Y., Liu, S., & Mathews, E. (2015). Convergence of digital humanities and digital libraries. *Library Management*, 36(4/5), 1–14.

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	5%
2	repository.usu.ac.id Internet Source	3%
3	www.pustakasiana.com Internet Source	1%
4	repository.ipb.ac.id:8080 Internet Source	1%
5	jurnal.ugm.ac.id Internet Source	1%
6	digilib.undip.ac.id Internet Source	1%
7	journal.unpar.ac.id Internet Source	<1%
8	tentang-semua.blogspot.com Internet Source	<1%
9	fib.ui.ac.id Internet Source	<1%
10	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	<1%
11	edoc.pub Internet Source	<1%
12	www.scribd.com Internet Source	<1%

13

Internet Source

<1%

14

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1%

15

humas.ui.ac.id

Internet Source

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On